

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Teori Pembangunan Ekonomi

Setiap pembangunan daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang pada umumnya berorientasi pada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup masyarakat pada negara tersebut.¹ Pembangunan ekonomi tidak hanya usaha negara-negara yang relatif belum berkembang, tetapi juga merupakan usaha-usaha negara yang relatif berkembang. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi, pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output tertentu dapat ditentukan oleh tersedianya sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi serta output itu sendiri.²

2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru dan

¹ Suryana, *Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan)*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 1.

² Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 2011, hlm. 4-5.

transformasi pengetahuan serta untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi daerah.³

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁴

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.⁵

Teori teori dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut:

a. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah, dengan

³ Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, CV Haji Masagung, Jakarta, Cet 15, 1994, hlm. 50.

⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

⁵ *Ibid*, hlm. 7-8.

kata lain sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.⁶

Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan material (bahan) untuk komoditas ekspor akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut dan demikian sebaliknya.

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan pada wilayah tersebut, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya, berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis.

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang digunakan adalah kuosien lokasi (*Location quotient/LQ*). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan. Teknik analisis LQ dapat menggunakan variabel tenaga kerja atau PDRB

⁶ Lincoln Arsyad, *Op. Cit.*, hlm. 300.

suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi wilayah. *Location Quotient* merupakan rasio antar jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama dengan daerah yang lebih tinggi.⁷

b. Teori Lokasi

Teori ini dipelopori oleh Alfred Weber seorang ahli ekonomi Jerman ini khusus untuk kegiatan industri pengolahan. Sehingga sangat terkait dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya-biaya dengan cara memilih lokasi yang strategis dan mendekati pasar. Strategis dalam arti mudah dalam mendapatkan bahan baku dan mudah dalam distribusi barang atau jasa.

Banyak variabel yang mempengaruhi kualitas atau suitability suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas pendidikan dan kualitas pemerintah daerah dan tanggungjawabnya. Keterbatasan dari teori lokasi pada saat ini adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.⁸

c. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Ekonomi Archipelago*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm. 19-21.

⁸ Lincoln Arsyad, *Op. Cit.*, hlm. 301.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang berbatasan. Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman.

d. Teori Kaukasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori kaukasi kumulatif (*cumulative causation*) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperpanjang kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Maka dari itu kita mengenal ada yang disebut daerah maju dan daerah terbelakang. Daerah maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya.

Menurut model ini, ketimpangan pembangunan regional hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah. Apabila hanya diserahkan pada mekanisme pasar, maka ketimpangan regional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan.⁹

e. Model Daya Tarik (*Attraction*)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.¹⁰

3. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam

⁹ Lincoln Arsyad, Loc.cit.,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 302.

diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Shah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan atau warna kulit, tetapi manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Tuhan dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Misi manusia menjadi pengabdian bagi penciptanya, sementara ibadah dan pengabdian pada sang pencipta menjadi tujuan hidup manusia. Karena islam bersifat menyeluruh, ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan.¹¹

Dalam persepektif islam, pembangunan didasarkan pada lima pondasi filosofis yaitu tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, khilafah, tazkiyyah an-nas dan al-falah. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam islam dan berasal dari dua sumber utama islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut paradigm islam, kelima fondasi ini menjadi syarat pembangunan yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tauhid Uluhiyyah, yaitu percaya pada kemahatunggalan Tuhan dan semua yang dialam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya pembangunan manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Manusia hanyalah penerima amanat atas segala sumberdaya yang disediakan dan harus mengupayakan agar manfaat dapat dibagikan secara merata kepada semua makhluk hidup.

¹¹ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 22-23.

- b. Tauhid Rububiyah, yaitu percaya bahwa Tuhan yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upaya sendiri, tetapi juga pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
- c. Khilafah, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di samping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepada-Nya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan kepada sesama manusia.
- d. Tazkiyyah an-nas, yaitu merujuk pada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan pembangunan (*agent of change and development*). Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apapun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.
- e. Al-Falah, yaitu konsep keberhasilan dalam islam bahwa keberhasilan apapun yang dicapai dikehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat, sepanjang keberhasilan semasa hidup di dunia tidak menyalahi petunjuk yang ditetapkan. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara upaya-upaya bagi pembangunan didunia maupun persiapan bagi kehidupan di akhirat.¹²

Pembangunan dalam kerangka islam ditemukan pada pola nilai (*value pattern*) yang melekat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, tujuan dan proses pembuatan keputusan pada semua level. Hal yang menjadi fokus utama bagi pembangunan adalah manusia. Proses pembangunan apapun harus

¹² *Ibid.*, hlm. 23-24.

dimulai dari pembangunan moral, spiritual, fisik dan sosial ekonominya. Manusia adalah agen perubahan yang aktif dan yang akan bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan hidupnya, baik di kehidupan dunia maupun diakhirat kelak. Oleh karena itu, pembangunan dalam islam mengandung arti tidak hanya sebagai proses produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi kelembagaan dan struktural atau pencapaian keseimbangan ekologis. Semua itu hanyalah alat yang diperlukan bagi pembangunan manusia lebih lanjut, dalam islam menekankan pada aspek moral serta mempunyai aqidah yang baik. Titik berat pendekatan islam pada pembangunan spiritual, moral dan etika yang telah melekat dalam proses pembangunan.

Tujuan pembangunan dalam perspektif islam adalah tercapainya kesuksesan di akhirat. Menurut Allah sukses adalah bila kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sukses disebut orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus (QS. 23: 9-11) sebagai berikut:

Allah berfirman dalam surat Al Mu'minun 23: 9-11

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾
 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya :*“Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (ya'ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal didalamnya”*.¹³

Ada lima tahapan utama yang harus dilalui agar tujuan akhir proses pembangunan, yaitu tercapainya sukses di akhirat terpenuhi. Kelima tahapan tersebut adalah pertama, tahapan persiapan kualitatif, aspek kualitatif bersumber dari manusia. Dalam Al-Qur'an, manusia

¹³ Al Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 9-11, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah Asy-Syarif Medinah Munawwarah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 527.

diumpamakan sebagai sebuah pohon (Q.S 14: 24-26). Akar, batang dan buah merupakan akidah, syariat dan muamalat. Dengan akidah yang baik, manusia akan mampu melaksanakan syariat dengan baik, yang akhirnya tercermin pada muamalat. Sebaliknya, manusia dengan akidah yang buruk pada akhirnya berdampak pada bentuk muamalat yang buruk pula. Dalam sebuah sistem, muamalat yang buruk tercermin pada hasil pembangunan yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kerusakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan proses pembangunan.

Allah berfirman dalam surat Ibrahim 14: 24-26 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. (Q.S Ibrahim : 24-26)¹⁴

Tahapan kedua adalah peran dan kedudukan manusia dalam sebuah sistem. Pada tahap ini, status manusia tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat sebagai sistem dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan ketiga yakni terciptanya

¹⁴ Al Qur'an surat Ibrahim ayat 24-26, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah Asy-Syarif Medinah Munawwarah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 383-384.

keuntungan kualitatif dan kuantitatif, misalnya kekayaan alam, keuntungan teknologi, keuntungan sosial-ekonomi, kepuasan spiritual dan moral dan sebagainya. Tahapan keempat yakni utilitas hasil-hasil pembangunan bagi proses pembangunan berikutnya. Penekanan islam pada manusia ditujukan untuk menjaga terjadinya keharmonisan atas hasil-hasil pembangunan diantara mereka, yakni dengan terjadinya distribusi hasil-hasil pembangunan secara merata atas penggunaan faktor-faktor produksi mereka. Islam juga menekankan pada upaya keberlangsungan proses pembangunan pada generasi berikutnya. Tahapan kelima yakni pembangunan yaitu tercapainya kesuksesan di akhirat.¹⁵

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Pembangunan dalam Perspektif Islam

Islam sebagai rahmatan lil alamin, akan memperkuat Negara dengan berbagai usaha dan penghasilan halal. Sesuai dengan syariat Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula cara islam dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan dilakukan dengan cara halal dan dukungan syariat. Rasulullah Saw memberi isyarat untuk berbagai masalah dunia yang berubah dan berkembang, setiap saat. Karena itu siapapun yang menjadi pelaku pembangunan atau pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi, sepanjang sesuai syariat. Dalam membangun ekonomi, pemerintah mempunyai landasan atau prinsip sebagai berikut:

a. Kepemilikan

Dalam hal kepemilikan, ekonomi pembangunan dalam perspektif islam, membagi menjadi tiga macam kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan Individual

Kepemilikan ini, dihargai dan dihormati oleh semua orang sehingga siapapun, akan merasa aman, tentram dan sejahtera dengan kepemilikannya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26-27.

2. Kepemilikan Umum

Dalam menyikapi anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini semua sumber daya alam, manusia mensyukurinya sebagai milik bersama. Misalnya sumber daya air, sumber daya rumput (pohon) dan sumber daya api (bahan bakar) sebagai milik bersama.

3. Kepemilikan Negara

Sumber pendapatan Negara adalah untuk Negara. Dan Negaralah yang mengatur pemanfaatannya untuk keperluan keamanan dan ketertiban Negara termasuk semua fasilitas yang menyangkut kesejahteraan bersama. Siapapun yang mengelola Negara adalah mengemban amanah dari sang pencipta sebagai khalifah dan khilafah yang adil dan bermanfaat.

b. Menghidupkan Tanah yang Mati (Lahan Terlantar)

Salah satu ciri Negara yang berkembang atau Negara miskin adalah kepemilikan faktor produksi yang sangat timpang antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Konsep ekonomi islam dalam hal kepemilikan tanah mati adalah menjadi kewajiban bagi pemiliknya untuk menghidupkan tanah yang mati. Apabila sang pemilik tidak mau memanfaatkannya dalam jangka panjang, maka harus memberikan kesempatan kepada rakyat yang membutuhkan.

c. Menghemat Sumber Daya

Pada dasarnya Ekonomi islam, sangat mengutamakan perilaku hemat, baik dalam konsumsi, maupun didalam proses produksi. Dengan berlaku hemat didalam proses produksi, maka tingkat efisiensi tertentu dapat dicapai dan peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Dengan berlaku hemat pada aspek konsumsi, maka akan tercapai kepuasan yang optimal. Artinya seorang konsumen hanya akan mencapai kepuasan optimal

(keseimbangan) jika tidak berlaku boros (mubazir) dan tidak kikir pula.

d. Menghindari Sistem Ribawi

Sesuai perkembangan dunia bisnis, mata uang kadang berubah menjadi komoditi dagang. Akibatnya uang beranak uang. Padahal dalam prinsip ekonomi islam, uang tidak menghasilkan uang, melainkan uang menghasilkan barang, dengan kegiatan halal secara syariah. Sedangkan sistem ribawi yang selama ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam dan bank-bank tertentu khususnya bank konvensional mempunyai status subhat, smapai haram.¹⁶

5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut.¹⁷ Kecendrungan tersebut haruslah berasal dari kekuatan yang berasal dari dalam perekonomian sendiri, bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Proses pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat *self-generating*, yang berarti proses pertumbuhan itu memerlukan kekuatan untuk kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.¹⁸

Pemikiran-pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke XV, saat terjadi revolusi pertanian di Eropa.

¹⁶ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam (Sebuah Studi Komparasi)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 31-37.

¹⁷ DR.Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1992, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

Aliran atau mazhab yang dikembangkan oleh Adam Smith disebut mazhab klasik sebab gagasan-gagasan yang ia tulis sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya.¹⁹ Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting seperti akumulasi modal yang merupakan semua investasi baru yang merupakan sumber-sumber alam yang berwujud tanah, sumberdaya manusia (*Human Resources*) atau jumlah penduduk dan stok capital yang ada. Sumber-sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut, artinya selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi adalah dua unsur produksi yaitu jumlah penduduk dan stok kapital yang ada. Dua unsur lain inilah yang menentukan besarnya output masyarakat. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitatif) dan pada tahap ini sumber-sumber alam akan membatasi output.²⁰

Adapun teori pertumbuhan ekonomi daerah menurut Adam Smith sebagai berikut, Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi dimulai dari hukum alam, pembagian kerja, proses pemupukan modal, agen pertumbuhan dan proses pertumbuhan. Adam Smith percaya terhadap berlakunya hukum alam, karena apabila setiap orang diberi kebebasan maka masing-masing orang akan berusaha keras untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Dalam hal ini setiap orang dibimbing oleh kekuatan yang tidak terlihat, dengan cara demikian masyarakat akan mencapai kemakmuran. Pembagian kerja adalah titik permulaan meningkatnya daya produktivitas tenaga kerja. Smith menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya

¹⁹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 27.

²⁰ Dr. Boediono, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

keterampilan pekerja, penghematan waktu dalam memproduksi barang dan penemuan mesin yang menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Tetapi apa yang mengarah pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan lainnya. Akan tetapi, pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

Proses pemupukan modal. Smith menekankan bahwa pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan semikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen pertumbuhan. Menurut Smith, para petani, produsen dan penguasa merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan pasar dan persaingan yang mendorong mereka memperluas pasar. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi kenaikan surplus pertanian sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan akan meningkat.

Proses pertumbuhan. Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat menggumpal (kumulatif). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan dibidang pertanian, industri manufaktur dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya penduduk, perluasan pasar dan keuntungan secara terus-menerus.²¹

²¹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 81-85.

Menurut Harrod Domar dalam sistem regional, Teori ini dikembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini melengkapai teori Keynes, dimana Keynes melihat dalam jangka pendek sedangkan Harrod-Domar melihat dalam jangka panjang. Teori Harrod –Domar didasarkan pada asumsi:

1. Perekonomian bersifat tertutup
2. Hasrat menabung masyarakat tinggi
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Teori Harrod-Domar sangat perlu diperhatikan bagi wilayah yang masih terbelakan dan terpencil. Dalam kondisi seperti ini, biasanya barang modal sangat langka sehingga sulit melakukan konservasi antara barang modal dan tenaga kerja. Untuk wilayah seperti itu, bagi sektor yang hasil produksinya tidak layak atau kurang menguntungkan untuk diekspor maka peningkatan produksi secara berlebihan mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar lokal dan tingkat harga turun drastic sehingga merugikan produsen.²²

Selanjutnya menurut Thomas Robert Malthus dengan teori penduduk. Menurut Malthus pembangunan ekonomi adalah suatu proses naik turunnya kegiatan ekonomi. Malthus memusatkan perhatiannya terhadap perkembangan kesejahteraan suatu Negara, yaitu pembangunan yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu Negara. Tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, peranan proses produksi dan distribusi, pengaruh faktor-faktor produksi dalam

²² Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 49-52.

pembangunan ekonomi dan proses akumulasi modal dalam pembangunan ekonomi.²³

6. Pendapatan Regional

Dalam analisis makroekonomi selalu digunakan istilah pendapatan nasional *National Income* dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu Negara.²⁴ Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau kabupaten dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dalam Badan Pusat Statistik PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, yang melakukan usahanya disuatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Atau dapat juga dikatakan sebagai jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. PDRB atas dasar berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.²⁵

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

²³ Febra Robiyanto, Wyati Saddewisasi dkk, *Ekonomi Pembangunan (Pengantar ke Pembangunan Ekonomi Indonesia)*, Studi Nusa, Semarang, 2003, hlm. 15.

²⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 35-36.

²⁵ Katalog BPS, *PDRB Kabupaten Jepara*, BPS Kabupaten Jepara, Jepara, 2012, hlm. 1.

a. Pendekatan produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada disuatu wilayah atau kabupaten dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan atau sektor atau sub sektor tersebut. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam seklai proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun.

Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik atau barang. PDRB menurut pendekatan produksi terbagi atas 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

1. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.²⁶

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan dilakukan dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi disuatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa

²⁶ *Ibid*, hlm. 1-2.

tanah, bunga modal keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung.²⁷

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan stok dan ekspor netto disuatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik.

Kemudian perhitungan PDRB dengan metode tidak langsung atau metode alokasi diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto dan netto setiap sektor atau sub sektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk dan alokator tidak langsung lainnya. Cara penyajian PDRB atas dasar harga konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.²⁸

7. Pengembangan Sektor Unggulan sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 2.

²⁸ *Ibid*, hlm. 2-3.

komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi yang utama adalah untuk memberikan kesempatan kerja bagi penduduk.²⁹ Selanjutnya untuk mencapai stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia seperti meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan, keuangan, mengangkat taraf hidup dan memperluas jangkauan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Selain sukses, pembangunan ekonomi akan berkah apabila aktivitas di dalamnya terhindar serta terbebas dari praktik-praktik ribawi.³⁰

Untuk mencapai sasaran pembangunan, strategi pembangunan harus diarahkan pada:

- a. Meningkatkan *output* nyata atau produktivitas yang tinggi yang terus-menerus meningkat.
- b. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah, ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
- c. Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan.
- d. Perubahan sosial, sikap, mental dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintahan.³¹

Sementara itu, fungsi-fungsi perencanaan sebagai berikut:

- a. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.

²⁹ Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Cet. 5, 2009, hlm. 122.

³⁰ Suryana, Op. Cit., hlm. 5-6.

³¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
- e. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.³²

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelumnya, peneliti sudah menemukan beberapa penelitian yang mengandung tema yang mirip mengenai analisis potensi ekonomi dan pengembangan komoditi unggulan sebagai bahan acuan dan perbandingan. Peneliti telah menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema beberapa jurnal penelitian diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nailatul Husna, Irwan Noor dan Mochammad Rozikin dengan judul “Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik”. Menjelaskan bahwa sektor yang paling potensial dikembangkan adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor pertambangan dan penggalian. Namun, dari hasil identifikasi upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendukung pengembangan sektor unggulan dilihat dari RPJPD maupun RPJMD cenderung memprioritaskan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran.

Relevansi adalah berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, ini terlihat dari alur pemikiran penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Komoditi Unggulan di Kabupaten Jepara. Sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada keunggulan daya saing daerah

³² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, Cet 3, 1997, hlm. 104-105.

serta rencana investasi pemerintah dan rencana yang akan dilakukan oleh sektor swasta, serta pengoptimalan kerjasama daerah disekitarnya.³³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Hendra Titisari dengan judul “Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar dan Sragen”. Menjelaskan bahwa pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dari tahun 1999 sampai dengan 2003 berfluktuasi. Analisis potensi internal (pertumbuhan dan kontribusi) sektor yang menempati posisi prima, berkembang dan gemuk untuk masing-masing daerah. Misalnya daerah Boyolali sektor yang menduduki posisi berkembang sektor listrik, gas dan air bersih, lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa-jasa. Sedangkan sektor yang paling berkontribusi adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan. Karanganyar sektor yang menduduki posisi berkembang sektor listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan perhubungan, lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sedangkan sektor pertanian, industri dan perdagangan menempati posisi gemuk atau yang paling berkontribusi.

Relevansi adalah berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, ini terlihat dari alur pemikiran penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Komoditi Unggulan di Kabupaten Jepara. Sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dari tahun 1999 sampai dengan 2003 berfluktuasi.³⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aryo Prawoto Wibowo, Muhammad Rio Revando dengan judul “Kajian Potensi Ekonomi dan Pengembangan Sumberdaya Batubara dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Barat”. Menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Barat

³³ Nailatul Husna, Irwan Noor dan Mochammad Rozikin, *Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 188-196.

³⁴ Kartika Hendra Titisari, *Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar dan Sragen*, Jurnal ilmiah Orasi Bisnis, ISSN: 2085-1375, Edisi ke-IV- Nopember 2010, hlm. 9-27.

mempunyai potensi sumberdaya batubara yang cukup besar. Keberadaan sumberdaya ini diharapkan dapat berperan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hal tersebut potensi ini dapat dibagi menjadi dua yaitu potensi ekonomi langsung dan potensi ekonomi tidak langsung. Dari perhitungan tersebut potensi langsung sumberdaya batubara cukup besar dengan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian dan pendapatan daerah sedangkan potensi tidak langsung sumberdaya batubara yakni pengganda ekonomi cukup baik walaupun nilainya masih rendah.

Relevansi adalah berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, ini terlihat dari alur pemikiran penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Komoditi Unggulan di Kabupaten Jepara. Sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada potensi ekonomi dan pengembangan sumberdaya batubara dalam mendukung pembangunan daerah. Serta identifikasi industri potensial pengguna batubara yang menemukan beberapa industri di daerah maupun di luar negeri yang dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya batubara Kabupaten Aceh Barat.³⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shanty Oktavilia dengan judul Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan mengalami kecenderungan penurunan sejak 2005-2009, yakni dari semula laju pertumbuhan sebesar 5,35% di tahun 2005 turun menjadi 4,7% di tahun 2009. Disparitas pendapatan antar daerah dapat menyebabkan permasalahan pembangunan dan

³⁵ Aryo Prawoto Wibowo dan Muhammad Rio Revando, *Kajian Potensi Ekonomi dan Pengembangan Sumberdaya Batubara dalam Upaya Mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Teknik Pembangunan, Volume XIX, Nomor 1, 2012, hlm. 35-42.

ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya mengurangi disparitas pendapatan adalah pengembangan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masing-masing daerah terutama daerah tertinggal.

Relevansi adalah berdasarkan penelitian terdahulu, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, ini terlihat dari alur pemikiran penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Komoditi Unggulan di Kabupaten Jepara. Sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada disparitas pendapat daerah yang tergolong tertinggal dalam upaya pemerataan distribusi pendapat di Provinsi Jawa Tengah.³⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Emi Nuraini dan Kirwani dengan judul Analisis Sektor Potensial di Kota Mojokerto tahun 2007-2011. Menjelaskan bahwa kota Mojokerto pada tahun 2009-2011 mengalami pertumbuhan yang positif namun pertumbuhan tersebut menjadi problematika dengan tingginya besaran inflasi yang melebihi pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 7,57%. Disamping itu pada tahun 2007-2011 kota Mojokerto tetap bertahan pada peringkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiga terendah Sejava Timur. Struktur perekonomian Kota Mojokerto tidak mengalami perubahan dan pergeseran yang berarti yakni tetap didominasi oleh sektor tersier. Sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai motor penggerak perekonomian Kota Mojokerto adalah sector bangunan dan konstruksi. Relevansi adalah berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, ini terlihat dari alur pemikiran penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada Analisis Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan Komoditi Unggulan di Kabupaten Jepara. Sedangkan

³⁶ Shanty Oktavilia, *Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mnegatasi Disparitas Pendapatan antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Volume 2, Nomor 1, ISSN 2089-3590, 2011, hlm. 219-228.

penelitian terdahulu menitikberatkan pada sektor basis dan non basis, pergeseran dan perubahan struktur perekonomian, serta sektor potensial Kota Mojokerto.³⁷

C. Kerangka Berfikir

Kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan geografi dan potensi ekonomi wilayah merupakan factor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Disamping itu, kurang lancarnya arus barang dan factor produksi antar wilayah turut pula memicu terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah merupakan kebijaksanaan ekonomi daerah yang sangat penting dan strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah.

Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang. Dengan diketahui faktor-faktor tersebut, maka pembangunan daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan diupayakan untuk menggali potensi yang ada agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral, keberhasilan dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan

³⁷ Emi Nuraini dan Kirwani, *Analisis Sektor Potensial di Kota Mojokerto Tahun 2007-2011*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 01, Nomor 01, 2013, hlm. 1-15.

adanya peningkatan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan perkembangan pembangunan suatu daerah.

Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong pengembangan ekspor barang dan jasa. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan pada kebijakan yang memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang. Adapun konsep pemikiran yang dijadikan dasar penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

